

Rabu, 13 September 2023

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	PPS dan PPK Harus Diasuransikan
Nama Media	Samarinda Post
Newstrend	PPS dan PPK Harus Diasuransikan
Halaman/URL	Pg9 dan 11
Tanggal Berita	2023-09-12
Sentimen	Positive

PPS dan PPK Harus Diasuransikan

Pemerintah Daerah Diminta Menganggarkan

SAMARINDA KOTA. KPU Kaltim mengusulkan adanya asuransi ketenagakerjaan untuk penyelenggara pemilu pada 2024 nanti. Khususnya untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menyebutkan bahwa usulan tersebut sudah

disampaikan kepada Pemprov Kaltim. Bagi KPU, adanya asuransi ketenagakerjaan untuk PPK dan PPS menjadi sangat krusial.

Baca: PPS... 11



PEMUNGUTAN SUARA. Anggota KPPS yang bertugas di setiap TPS wajib diberikan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Tugas mereka saat hari H pemungutan suara sangat krusial.

PPS...

Sambungan hal 9

"Di KPU Kaltim, kami memiliki beberapa hal yang sudah disampaikan ke Pemprov Kaltim dan aspirasi itu sudah diterima," ucapnya pada Sapos, Senin(11/9) kemarin.

Rudi menyebut pihaknya beserta keluarga besar penyelenggara pemilu se-Kaltim mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kaltim Isran Noor yang sudah mengkomodir usulan tersebut. Wacana tersebut segera direalisasikan sembari menunggu kesiapan pem-

prov hingga pemkab dan pemkot masing-masing untuk menganggarkan dananya.

"Kami berterima kasih, untuk asuransi Ketenagakerjaan khususnya bagi PPK dan PPS telah diterima usulannya," bebernya.

Sedangkan untuk para komisioner, asuransi ketenagakerjaan itu memang bukan hal yang wajib. Rudiansyah juga mengamini hal tersebut. Sebab PPK dan PPS menjadi prioritas untuk diberikan asuransi ketenagakerjaan itu.

"Terpenting bagi kami adalah PPK dan PPS kami bisa terasuransikan dimulai dari pemilu sekarang dan untuk komisioner Kal-

tim sebetulnya tidak juga wajib (diberikan)," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor juga angkat suara. Diketahui, ada berbagai pertimbangan hingga akhirnya KPU Kaltim mengusulkan adanya asuransi ketenagakerjaan bagi PPS dan PPK.

Salah satunya adalah beban kerja yang akan diemban pada Pemilu 2024 nanti akan sangat berat. Mengingat, masyarakat Indonesia yang punya hak pilih akan memilih peserta pemilu dari 5 tingkatan. Mulai presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, DPR

RI, dan DPD RI.

"Kita mulai dari Kaltim, siapkan. Cukup saya kira (dana) untuk asuransi, yang tidak perlu dikasih itu Ketua KPU dan Bawaslu-nya, kalau anak buahnya harus," ucapnya.

Isran menegaskan di dalam APBD, harus ada anggaran untuk memastikan penyelenggara pemilu, khususnya PPS dan PPK bisa mendapatkan haknya dalam bekerja, yakni diberikan asuransi ketenagakerjaan.

"Saya berharap agar menyisihkan dana asuransi bagi penyelenggara Pemilu, baik KPU sampai ke bawah, hingga pengawasnya," pungkasnya. (mrf/nha)

Judul	Jangan Puas Punya Banyak Polis Asuransi, Nasabah Harus Rajin Evaluasi Berkala
Nama Media	Sinar Indonesia Baru
Newstrend	Nasabah diminta untuk membaca dan mempelajari polisnya dengan saksama
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-09-12
Sentimen	Positive

Jangan Puas Punya Banyak Polis Asuransi, Nasabah Harus Rajin Evaluasi Berkala

Jakarta (SIB)

Setelah menerima polis, nasabah biasanya diminta untuk membaca dan mempelajari polisnya dengan saksama. Selanjutnya, selama masa perlindungan berlangsung, nasabah dapat mengevaluasi polis secara berkala sebab kebutuhan asuransi bisa saja berubah pada tahun-tahun mendatang.

"Nasabah bisa mengevaluasi polis asuransi pada setiap perubahan tahap kehidupan atau setahun sekali," kata Faculty Head of Sequis Training Academy of Excellence Samuji, MPD, CFP, CPC.

Membeli polis asuransi berarti nasabah bisa mendapatkan penanganan medis yang berkualitas saat membutuhkan rawat inap atau mendapatkan Uang Pertanggungan (UP) untuk keluarga jika terjadi risiko meninggal dunia. Tidak sedikit nasabah yang mungkin saat ini merasa sudah cukup terlindungi karena memiliki banyak polis, tetapi setelah dicek ternyata semuanya adalah polis asuransi jiwa berjangka (term life) dengan jangka waktu pertanggungan tertentu, sedangkan Anda juga perlu proteksi untuk kesehatan, pendidikan anak, pensiun, warisan, dan lainnya.

Jika pada 2013 kita mem-

beli polis dengan perlindungan Rp 300 juta per tahun atau kamar rumah sakit Rp 500 ribu/hari, kemudian seiring pertambahan usia dan meningkatnya risiko sakit maka sudah pasti tidak lagi relevan dengan kebutuhan perawatan medis di tahun ini karena biaya kesehatan cenderung naik setiap tahun.

Menurut Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trend 2023, biaya kesehatan di Indonesia naik lebih dari 13 persen setelah pandemi Covid-19 sehingga jika nasabah tidak mengevaluasi manfaat polis asuransi kesehatan, bisa jadi saat nanti dibutuhkan, manfaatnya tidak akan dapat menanggung biaya perawatan medis yang ditagihkan oleh rumah sakit.

"Besarnya kemungkinan, selisih nilai tagihan klaim yang harus ditanggung nasabah akan jauh lebih besar. Jika itu terjadi, tentu akan mengganggu kondisi finansial keluarga," ungkap Samuji.

Mengenai asuransi jiwa, Samuji menyatakan nilai UP juga perlu dievaluasi sebab ada inflasi yang dapat membuat biaya hidup meningkat. Sama halnya dengan manfaat asuransi kesehatan, maka pada asuransi jiwa yang dibeli pada tahun 2013 dengan UP

Rp 300 juta bisa jadi tidak lagi relevan lagi dengan biaya hidup tahun ini. Demikian juga jika saat ini UP Rp 1 miliar, bisa saja pada 20 tahun mendatang, nilai ini tidak cukup untuk menjadi warisan bagi keluarga.

Idealnya, UP dapat dimanfaatkan anggota keluarga untuk membiayai kebutuhan dalam jangka waktu tertentu, membiayai urusan pemakaman, dan melunasi utang Tertanggung semasa hidup jika ada.

Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu telah memberi pelajaran bahwa asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sangat penting dimiliki oleh semua anggota keluarga. "Mereka yang sebelumnya tidak memiliki asuransi merasa sangat menyesal ketika Covid-19 mengganggu finansial keluarga karena biaya perawatan medis hingga serangan kematian yang terjadi secara masif," kata Samuji.

Samuji juga mengingatkan agar nasabah yang akan melakukan evaluasi polis dapat memperhitungkan pendapatan tahunan dan perkiraan pengeluaran pada masa mendatang. Hal ini agar tidak merasa kesulitan untuk membayar premi dalam jangka panjang. (R0921R2.00.012)

Judul	DOSIS RINGAN INJEKSI BUMN
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg1
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

PMN Tunai BUMN dalam APBN 2023

Perusahaan	Rp Triliun
PT Sarana MultiGraha Finansial	1,53
PT Hutama Karya	26,88
PT Lusa Industri	1,75
PT Perusahaan Listrik Negara	10,02
Airmax Indonesia	0,65

USULAN TAMBAHAN

Perusahaan	Rp Triliun
IFG	3,02
Injournery	1,01
PT Bina Karya	0,50

PMN Tunai BUMN dalam RAPBN 2024

Perusahaan	Rp Triliun
PT Hutama Karya	18,62
PT BPU	3,55
PT Wijaya Karya	6,03

Realisasi PMN BUMN (Rp Triliun)

Tahun	Realisasi
2019	38,6
2020	24,7
2021	15,9
2022	35,5
2023	42,4

DOSIS RINGAN INJEKSI BUMN

PT Bina Karya.

Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya.

Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun.

Sejatinya, pemerintah dan DPR tidak memberikan jalan mulus untuk mengucurkan PMN hingga Rp57 triliun karena dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan konsolidasi fiskal.

Solusinya, PMN ditambah, tetapi dengan angka yang lebih moderat. Sumber dana pun berasal dari realokasi cadangan pembiayaan investasi, sehingga penggelembungan PMN tidak memengaruhi prospek defisit fiskal.

Bukannya tanpa alasan pemerintah mengusulkan penambahan PMN. Sebab, ada banyak tugas yang patut disebut, terutama infrastruktur. Suntikan untuk BUMN juga ditujukan guna mempercepat proyek strategis nasional (PSN).

Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (12/9), meminta Parlemen untuk menyepakati usulan penambahan modal tersebut.

Sri Mulyani pun menggaransi, PMN untuk BUMN dikucurkan dengan landasan yang kuat. Dengan kata lain, dana segar akan mengalir hanya jika perusahaan negara memiliki kontrak kerja yang konkret.

"Kami sekarang minta kontrak kerja, sehingga tidak memasukkan injeksi uang begitu saja," katanya, kemarin.

Pemerintah menyadari, idealnya PMN diberikan kepada BUMN dalam rangka menggaransi keberlanjutan pengerjaan proyek yang telah ditugaskan oleh negara, alias tidak terkait langsung dengan perbaikan kinerja keuangan perusahaan.

Namun, pemerintah juga memiliki pertimbangan lain, yakni perlunya menjaga performa perusahaan tetap sehat agar pengerjaan proyek tidak terbengkalai.

Dalam kaitan ini, sejumlah pejabat di Kementerian BUMN tidak bersedia memberikan keterangan. Namun, BUMN yang mendapatkan PMN telah menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan PMN itu.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Mahendra Wijaya, mengatakan perseroan tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya.

Adapun pada tahun depan, perseroan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024. "Perseroan terus berupaya optimal menangkap potensi termasuk proyek pemerintah sebagai bekal aktivitas usaha secara berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mengingatkan BUMN untuk memaksimalkan penggunaan PMN. Sebab ada banyak sisa PMN yang tidak terserap oleh perusahaan pelat merah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, mengatakan idealnya PMN hanya diberikan kepada perusahaan yang mengerjakan proyek dengan nilai besar jangka panjang.

"PMN harus disalurkan kepada BUMN yang sehat, bukan untuk mengobati yang sakit," ujarnya. (Anissa R. Kamathina/Donoso Damayanti)

Judul	Penyidikan Kresna Life Tuntas
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Kasus Kresna Life
Halaman/URL	Pg8
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Negative

| DUGAAN PENGGELAPAN DANA |

Penyidikan Kresna Life Tuntas

Bisnis, JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyatakan telah menuntaskan penyidikan kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life Insurance.

Bareskrim Polri telah melimpahkan tersangka Kurniadi Sastrawinata (KS), mantan Direktur Utama Kresna Life, dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Herawan mengatakan pelimpahan berkas perkara tersangka KS kepada Kejagung terjadi setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

“Pada tanggal 5 september 2023 berdasarkan surat Dittipideksus Bareskrim Polri No. B/76/IX/RES.1.11./2023/DITTIPIDEKSUS, telah dilakukan pelimpahan tersang-

ka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung RI,” kata Whisnu, Selasa (12/9).

Whisnu menyebut bahwa terdapat sembilan laporan polisi yang masuk dengan terlapor sekaligus Tersangka KS. Modusnya adalah dengan menginvestasikan premi dari produk asuransi k-lita atau kresna link investa dan PIK atau protecto investa kresna di saham atau efek terafiliasi yang melebihi ketentuan OJK.

“Tidak memberitahukan atau melaporkan kepada pemegang polis tentang perkembangan investasi atau nilai aktiva bersih,” ujar Whisnu.

Menurut, jumlah korban sebanyak 278 orang dan kerugian sebanyak kurang lebih Rp431 miliar. Dengan demikian, pelaku disangkakan Pasal 75 Undang-Undang No.40/2014 tentang Perasuransian dan/atau Pasal 378 KUHP

dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu terkait dengan perkara group kresna lainnya yaitu Kresna sekuritas di mana penyidik pada 11 September 2023 telah melakukan gelar perkara guna meningkatkan status tersangka MS Selaku Owner Group Kresna.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga tersangka lainnya yaitu OB, EH dan MTS untuk perkara terkait gagal bayar para nasabah korban yg menempatkan dana pada PT Pusaka utama persada dan PT Makmur Sejahtera Lestari selaku perusahaan yang digunakan untuk menerima dana para nasabah korban dengan bentuk perjanjian jual beli saham menggunakan PT Kresna Sekuritas. (Anshary Madya Sukma)

Judul	LPS Matangkan Program Penjaminan Polis
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	LPS Matangkan Program Penjaminan Polis
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

| BISNIS ASURANSI |

LPS MATANGKAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS

Bisnis, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan terus menyiapkan kerangka penjaminan polis untuk industri asuransi yang akan mulai diimplementasikan pada 2028. Pelaku industri asuransi punya waktu yang cukup untuk menyesuaikan regulasi anyar itu.

Rita Anggrani & Perella R. Untari
ritau@bisnis.com

Penjaminan polis asuransi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Berdasarkan Pasal 529 UU PPSK, penjaminan polis untuk perusahaan asuransi dan asuransi syariah mulai berlaku sejak 5 tahun setelah undang-undang berlaku.

Raga LPS, penjaminan polis asuransi merupakan mandat baru yang mesti dijalankan. Selama ini, peran LPS masih sebatas pada penjaminan simpanan nasabah di industri perbankan.

Wakil Ketua Dewan Komisiner LPS Lana Soelistianingsih mengatakan bahwa mekanisme penjaminan polis diberikan apabila perusahaan mengalami gagal bayar dan klaim polis sudah jatuh tempo.

"LPS akan membayarkan klaim jatuh tempo sebesar maksimum penjaminannya. Harus ada maksimum karena enggak bisa seluruhnya," ujar Lana dalam acara Sosialisasi UU 4 Tahun 2023 dikutip dari kanal Youtube OJK, Selasa (12/9).

Menurut Lana, mengacu ke UU PPSK itu apabila klaim polis belum jatuh tempo, LPS dapat mengalihkan polis tersebut pada perusahaan asuransi yang sehat.

Dia mengatakan perluasan peran LPS itu merupakan tantangan baru bagi lembaga itu. LPS dan

perusahaan asuransi punya waktu untuk mempersiapkan semua regulasi dan berbagai ketentuan untuk mendukung program penjaminan polis tersebut.

"Ini tentunya tantangan yang menarik dan menantang untuk LPS, karena LPS sebelumnya belum pernah menjadi penjamin asuransi tapi pemerintah memberikan tugas tersebut kepada LPS untuk menjadi lembaga penjamin polis dari perusahaan asuransi," katanya.

Dalam penjaminan polis asuransi, kata Lana hanya berlaku untuk asuransi jiwa dan asuransi umum. Namun, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PayDI) atau unit-linked tidak termasuk didalamnya.

"Untuk tahap awal yang nantinya akan dilakukan [penjaminan] khususnya untuk asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa ini yang

lebih rumit jika murni, enggak ada yang terkait dengan unit-linked," katanya.

Jika mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juli 2023, nilai tagihan premi untuk penutupan langsung di industri asuransi jiwa senilai Rp4,54 triliun. Lalu, tagihan premi di industri asuransi umum tercatat senilai Rp3,82 triliun.

Dilhat dari sisi aset, industri asuransi umum mengelola sekitar Rp204,91 triliun. Adapun, industri asuransi jiwa mencapai Rp590,8 triliun.

Dalam kesempatannya sebelumnya, Lana berharap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk

mendigitalisasikan data nasabah. Dalam pelaksanaan melakukan penjaminan terhadap nasabah, banyak masalah-masalah yang akan muncul saat melakukan verifikasi suatu simpanan dengan kategori layak bayar atau tidak.

"Terkait dengan sesuatu hal yang membuat perusahaan itu akhirnya tidak bisa beroperasi yang berhasil gagal, misal agensi ternyata tidak membayarkan polis kepada perusahaan asuransi. Itu tentunya enggak bisa LPS mengembalikan klaim atas penjaminan polis dan nasabah tersebut karena tidak ada datanya," ujarnya.

Oleh karena itu, Lana meminta agar setiap perusahaan asuransi memiliki data yang tercatat untuk proses verifikasi.

"Kami sangat mengharapkan, karena masih 5 tahun lagi, sudah mulai memastikan bahwa polis asuransi yang dibayar oleh nasabah itu betul-betul tercatat," tutup Lana.

Retna Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abhineti Taim menilai berdasarkan prinsip asuransi, risiko yang dapat diasuransikan hanyalah risiko murni.

"Sementara investasi unit-linked bukan termasuk risiko murni sehingga tidak dapat diasuransikan," kata Abhineti kepada Bisnis, Senin (11/9).

TAMBAHAN KOMISIONER
Adapun terkait dengan peran LPS sebagai lembaga penjamin polis di sektor asuransi, jajaran komisiner di lembaga itu akan disiapkan mendekati implementasi pada 2028.

Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penambahan Dewan Komisiner LPS akan dilakukan pada 2027.

“LPS akan membayarkan klaim jatuh tempo sebesar maksimum penjaminannya.”

"Menurut UU PPSK setelah sebelum implementasi paling lambat itu bisa direkrut [DK LPS], jadi 2027. Tapi nanti kita lihat ke depan, kalau memang berat banget, kami akan rekrut secepatnya," kata Purbaya.

LPS, kata Purbaya sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mulai membuka rekruitmen untuk komisiner asosiasi.

"Kami lihat dulu beberapa bulan ke depan seperti apa, ini kan masih baru [tugas] asuransi boat kami," ujar Purbaya.

Adapun untuk saat ini, Purbaya menyampaikan bahwa pembentukan organisasi asuransi dan segala persiapannya akan dikendalikan olehnya secara langsung.

Dengan kata lain, lan-

jut Purbaya, hingga saat ini LPS belum memiliki kandidat untuk menempati posisi komisiner LPS yang anyar.

"Kalau [rekrut DK LPS] sekarang terlalu cepat, karena kami enggak tahu kebutuhannya seperti apa. Karena struktur organisasi ini harus disesuaikan dengan DPR, itu penting," katanya.

Terkait dengan syarat perusahaan asuransi yang dapat turut serta dalam program penjaminan polis asuransi, kata Purbaya salah satu yang akan dipakai sebagai ukuran yakni tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC).

"Belum tahu kriteria [peserta yang dijamin Lembaga Penjaminan Polis/LTP], tapi yang jelas persyaratan minimal sebat di OJK pasti berlaku. Bisa [dihub] dari RBC, tapi belum kita tentukan sekarang berapa-berapa," katanya.

Namun demikian, Purbaya menekankan bahwa perusahaan asuransi yang sehat dengan kriteria tertentu akan dijamin oleh LPS. Kriteria kepesertaan ini pun akan disinkronkan secara ketat bersama OJK.

Purbaya menuturkan bahwa program penjaminan polis ini harus diimplementasikan dengan matang.

"Jangan sampai setelah [PPP] setelah diimplementasikan, ada 10-20 perusahaan asuransi jatuh bangkrut, kami enggak mau. Kita mau pastikan dulu, karena itu akan mempengaruhi kredibilitas dari PPP [Program Penjaminan Polis] itu sendiri. Kalau setahun pertama banyak yang jatuh, itu udah enggak ada percaya lagi, jadi percuma dijamin," jelasnya.

(Bisnis.com & detik.com)



Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memperoleh mandat baru dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk menjamin polis asuransi. Sejumlah poin yang diatur dalam program penjaminan polis mencakup:

Terdapat polis yang dilakukan pengalihan portofolio dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memenuhi persyaratan ditetapkan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya masih dalam proses penanganan oleh LPS dalam rangka pelaksanaan program penjaminan polis.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada LPS untuk menentukan polis yang layak dijamin.

Indikator Industri Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum

Asuransi Jiwa	
Investasi	Rp520,52 triliun
Aset	Rp590,8 triliun
Tagihan premi penutupan langsung	Rp4,54 triliun
Tagihan premi asuransi	Rp420 miliar
Asuransi Umum	
Investasi	Rp162 triliun
Aset	Rp204,91 triliun
Tagihan premi penutupan langsung	Rp3,82 triliun
Tagihan premi asuransi	Rp2,82 triliun

Dalam rangka menjalankan tugas untuk melaksanakan program penjaminan polis, LPS dapat melakukan penelitian terhadap data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang disampaikan kepada LPS.

Pengumpulan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta dilakukan dari informasi kelengkapan perusahaan.

Program penjaminan polis dilaksanakan atas polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir, dengan cara pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan/atau klaim polis asuransi yang disebabkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau LPS, dengan cara pembayaran klaim penjaminan.

Pelaksanaan program penjaminan polis dilakukan terhadap polis asuransi yang masih aktif atau belum berakhir, dengan cara pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan/atau klaim polis asuransi yang disebabkan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah atau LPS, dengan cara pembayaran klaim penjaminan.

Judul	Rasio RBC Asuransi Jiwa Masih Sehat
Nama Media	Kontan
Newstrend	Rasio kesehatan perusahaan asuransi jiwa
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

Rasio RBC Asuransi Jiwa Masih Sehat

Pemain memiliki alarm sebelum di batas minimal RBC

Vina Destya

JAKARTA. Rasio kesehatan perusahaan asuransi jiwa menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat *risk based capital* (RBC) asuransi jiwa per Juli 2023 ada di level 460,32%. Angka ini lebih rendah dari posisi Juni 2023 yang berada di 467,85%. RBC asuransi jiwa per Juli 2023 juga lebih rendah dibanding posisi Juli 2022 yang ada di 489,93%.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, RBC memang sedang dalam tren yang menurun. Tapi penurunannya dinilai masih wajar. Menurut Togar, RBC kerap berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat solvabilitas perusahaan serta kondisi modal minimum berbasis risiko (MMBR).

Tetapi secara agregat RBC industri asuransi masih berada di atas batas minimal di 120%. "Meski RBC turun tapi masih sekitar empat kali lebih besar daripada RBC minimal yang diwajibkan," kata Togar.

Togar yakin RBC asuransi jiwa akan bertahan di atas batas aman. Kinerja industri asuransi jiwa juga akan tetap positif di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

PT Asuransi BRI Life juga

masih mencatatkan *risk based capital* (RBC) di atas rata-rata industri. Per Juli 2023, RBC BRI Life ada di 481,0%. Angka ini naik dari posisi Juni 2023 yang ada di level 479%.

Validasi berkala

Direktur Utama BRI Life Iwan Parsila mengatakan, BRI Life sangat memperhatikan RBC. Produk harus memiliki profitabilitas yang baik. "Kami juga melakukan proses pemasaran dengan baik dan memperhatikan *proper market conduct* serta memitigasi potensi *mis-selling*," kata dia.

BRI Life juga melakukan validasi secara berkala. "Ini untuk memastikan asumsi yang digunakan masih valid," ujar Iwan, Selasa (12/9). BRI Life juga menempatkan investasi sesuai kebijakan investa-

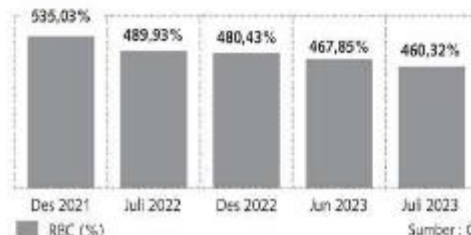
si, memperhatikan karakteristik kewajiban, likuiditas dan kualitas aset.

RBC PT BNI Life Insurance juga jauh di atas rata-rata industri, yakni 693,63% per Agustus 2023. Angka ini lebih tinggi dari posisi Juli 2023 di 650,68%. Plt. Direktur Utama BNI Life Ehen Eser Nainggolan bilang, pihaknya selalu memantau dan mengevaluasi rutin faktor risiko yang mempengaruhi rasio RBC.

BNI Life juga membuat rencana modal yang memadai. "Kami menentukan target rasio modal dasar yang harus dicapai dan dipertahankan," ujar dia.

Perusahaan ini juga menetapkan alarm untuk menjaga pemenuhan tingkat solvabilitas agar tetap sehat. "BNI Life membuat alarm *alert* sendiri jika tingkat RBC di kisaran 475%," kata Eben.

Rasio Kesehatan Asuransi Jiwa



Judul	PMN untuk Infrastruktur
Nama Media	Kompas
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg10
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

PMN untuk Infrastruktur

Kementerian Keuangan meminta percepatan penyaluran penyertaan modal negara untuk pembangunan infrastruktur. Juga penyehatan BUMN.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Keuangan meminta dukungan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat penyaluran penyertaan modal negara atau PMN di awal 2024 untuk pengerjaan proyek infrastruktur. PMN juga akan membantu penyehatan badan usaha milik negara.

Menkerti Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, Rapat Paripurna Kerja Anasmi Dasar, Pendapat, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada tiga BUMN untuk disalurkan di awal triwulan I-2024. Perlu dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh Komisi XI DPR sehingga pemerintah dapat mengesek PMN setelah UU APBN 2024 ditetapkan.

Penyertaan Modal Negara Tunai 2024

Rapat Paripurna Kerja Anasmi Dasar, Pendapat, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada tiga BUMN untuk disalurkan di awal triwulan I-2024.

Sumber: Kementerian Keuangan



bersama pejabat eselon I Kementerian Keuangan dan BUMN penerima PMN.

"Dalam UU, kan, ada klausul, pemecatan dilakukan dengan pendalaman di Komisi XI Bidang Keuangan. Makudanya, agar setiap pengeluaran PMN harus berdampak positif dan bermanfaat di tempat proyek dikerjakan," kata Gus Irawan.

Selektif

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celos) Bhima Yudhistira berpendapat, PMN yang ditujukan untuk pemeliharaan BUMN cenderung sulit membuka lapangan kerja baru. "Adanya kewajiban membayar utang tenaga kerja vendor justru yang harus dipikirkan BUMN-BUMN. Pemerintah harus memastikan bahwa PMN yang diberikan itu benar-benar untuk pemeliharaan infrastruktur, bukan untuk pemeliharaan BUMN-BUMN," ujarnya.

Buganungun, lanjut Bhima, pemerintah harus selektif menyalurkan PMN. "Lebih baik diberikan pada perusahaan yang urgen untuk menyelesaikan proyek infrastruktur. Yang masih belum atau dalam tahap perencanaan bisa ditunda dulu," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih kreatif memberikan pembiayaan pada BUMN agar tidak lagi mengandalkan PMN. Apalagi, APBN saat ini dibayangi beban pembiayaan bunga utang.

"PMN ini, kan, seperti memindahkan beban bunga dari BUMN ke pemerintah karena pemerintah yang menanggung bunga utang. Jadi, harus hati-hati dan selektif, tidak semua permintaan pembiayaan kerja dipenuhi," tuturnya. (DHO)

PMN kemudian dia masuk rencana, tanpa ada kaitannya dengan proyek yang harus diselesaikan," ujar Sri Mulyani.

Terakhir, PT BPUI harus menambah modal untuk mengonfirmasi IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan pola hasil restrukturisasi dari PT Anasmi Jember. "Masih ada kekurangan dalam penyelesaian pola sebesar Rp 3,556 triliun yang kita harapkan bisa diselesaikan di awal 2024," ucapnya.

Dampak keberlanjutan

Sri Mulyani menjelaskan, dampak ekonomi dan sosial penyaluran dana proyek pembangunan sudah dirak.

"Misalnya pada BUMN karya, kita akan lihat berapa dampak penciptaan lapangan kerja, baik langsung maupun

tidak langsung. Proyek berbasis layanan banyak yang tidak langsung (dampak ekonominya). Kalau (BUMN) karya menghasilkan penciptaan kerja langsung dan tidak langsung dari efek multiplier ekonominya," kata Sri Mulyani.

Menurut berbagai kajian, investasi pemerintah di infrastruktur, termasuk lewat PMN ke BUMN, beberapa tahun terakhir telah menyerap tenaga kerja lebih dari 20 juta orang. Penempatan tenaga kerja itu dihasilkan oleh proyek pembangunan jalan, bandara, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, dan penyediaan air minum.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Gus Irawan Pasiriba, berpendapat, meski angka kajian itu besar, ia mengingatkan lapangan pekerjaan

yang memang berkelanjutan.

"Saya ambil kesimpulan kalau data itu besar, tetapi karena proyek itu musiman, berarti mereka yang dulu sudah bekerja, menganggur lagi. Itu yang kita harus pikirkan ke depan agar ada kesinambungan. Kalau sudah kerja, ada keahlian, tidak berhenti masim-an saja. Itu yang kita minta, setiap pengeluaran uang negara dalam bentuk PMN yang benjang proyek bisa memberikan manfaat sebesar dan sebesarnya bagi rakyat, minimal di tempat proyek terbangun," ujarnya saat ditemui usai rapat kerja.

Ia mengatakan, DPR tentu akan mendukung percepatan penyaluran dana agar anggaran dapat diserap lebih awal. Rapat kerja pun akan dilanjutkan dengan pembahasan mendetail

Judul	IFG Kebagian PMN di Awal Kuartal I-2024
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg16
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

IFG Kebagian PMN di Awal Kuartal I-2024

JAKARTA, ID - Pemerintah berencana mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awal kuartal I-2024, satu di antaranya adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) untuk penyelesaian permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya. Percepatan pencairan dilakukan lantaran waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan sejumlah BUMN tersebut.

"Untuk 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut," ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (12/9/2023).

Ia mengatakan, di dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 pada 5 September 2023, disepakati PMN kepada tiga BUMN untuk dicairkan di awal kuartal I-2024. Namun, menurutnya kesepakatan panja tersebut perlu dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh Komisi XI DPR RI sehingga pemerintah dapat memproses PMN setelah UU APBN 2024 ditetapkan.

Menkeu mengatakan dalam

penyaluran PMN, pemerintah tetap menentukan dana PMN akan disalurkan untuk program BUMN yang akan dikerjakan. Hal ini guna memastikan agar penyaluran PMN bisa tepat sasaran dan tidak terpakai untuk kepentingan lain oleh perusahaan tersebut.

Adapun BPUI yang juga dikenal sebagai Indonesia Financial Group (IFG) akan menerima PMN sebesar Rp 3,55 triliun pada kuartal I-2024. Dalam hal

ini, PMN akan digunakan untuk penguatan kapasitas permodalan anak usaha IFG yakni IFG Life, dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.

"Dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia masih ada keluaran penyelesaian pengalihan polis sebesar Rp 3,55 triliun yang kita harapkan bisa direalisasikan pada awal 2024," kata Sri Mulyani.

Untuk metodologi penyaluran

PMN, lanjut dia, pihaknya akan meminta kontrak kinerja kepada perusahaan penerima PMN, sehingga dia tidak memasukkan injeksi uang begitu saja kemudian pemerintah tidak melakukan monitoring.

"Jadi, walaupun melakukan PMN kita tetap ada earmark untuk proyek apa. Guna memastikan PMN tidak hilang dengan masalah keuangan dari berbagai BUMN tersebut," tegas Menteri.

(ark/ks)

Judul	FWD Berkah Pendidikan, Asuransi Untuk Masa Depan Kuliah Anak
Nama Media	Pasundan Ekspres
Newstrend	FWD Insurance Indonesia resmi menghadirkan FWD Berkah Pendidikan
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

FWD Berkah Pendidikan, Asuransi Untuk Masa Depan Kuliah Anak

JAKARTA-PT FWD Insurance Indonesia resmi menghadirkan, FWD Berkah Pendidikan, yang merupakan produk asuransi pendidikan pertama di Indonesia. FWD Berkah Pendidikan ini menyediakan manfaat asuransi dengan layanan dukungan konseling bagi orang tua dalam mendampingi buah hati mereka menyiapkan masa depan.

Hal ini dapat menjadi solusi untuk mendapatkan akses kejenjang pendidikan tinggi di universitas. "Masyarakat Indonesia menghadapi tantangan kenaikan biaya pendidikan yang berkisar 10 hingga 15 persen setiap tahun menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujar Ade Bungsu, Direktur, Chief Syariah and Business Development Officer FWD Insurance, Selasa (12/9).

"Oleh karena itu FWD Berkah Pendidikan, produk asuransi dengan prinsip syariah hadir untuk mendukung orang tua yang mempersiapkan rencana pendidikan bagi anak mereka," tambahnya.

Berikut keunggulan FWD Berkah Pendidikan yang

dapat membantu para orang tua merencanakan pendidikan anak. Diantaranya, manfaat tunai yang dapat digunakan untuk dana pendidikan anak selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan secara sekaligus dan bulanan ketika anak berusia 18 sampai dengan 22 tahun.

Selain itu, proteksi finansial berupa santunan tunai dan pembebasan pembayaran kontribusi lanjutan, serta dana tunai pendidikan berkala ketika terjadi risiko terhadap orang tua, seperti meninggal dunia, cacat tetap total, dan terdapat penyakit kritis. Sehingga diharapkan pendidikan buah hati dapat tetap berjalan sesuai rencana meskipun terjadi risiko terhadap orang tua selama masa pendidikan hingga lulus kuliah. "Proteksi finansial ini merupakan proposisi produk yang berbeda dan pertama di pasar," ujarnya.

Dia menambahkan, manfaat lainnya fleksibilitas untuk menyesuaikan jangka waktu pembayaran kontribusi sesuai kemampuan.

Sementara Psikolog Klinis Profesional Ayo Sutomo mengatakan, setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. "Dalam perjalanan mempersiapkan pendidikan masa depan anak, sering kali terdapat berbagai tantangan yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis (psychologi calwell-being) orang tua," ungkap Ayo.

Menurutnya, hal ini tak jarang memicu konflik dan perubahan kondisi emosional orang tua secara drastis yang juga dapat berdampak pada komunikasi dan kehidupan sehari-hari. "Untuk itu, kesehatan mental orang tua penting untuk diperhatikan. Mereka perlu mendapat masukan dan konseling agar lebih siap untuk mempersiapkan masa depan anak yang lebih baik," jelasnya.

Kebutuhan inilah yang mendasari FWD Insurance untuk menyediakan layanan dukungan kesehatan mental bagi orang tua, yaitu berupa konsultasi dengan ahli di bidang kesehatan mental melalui pesan dan video tanpa dikenakan biaya melalui

aplikasi Thought Full Chat selama satu tahun, di mana saja, kapan saja, semuanya dapat dilakukan dari telepon genggam. "Layanan dukungan kesehatan mental ini merupakan upaya kami menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam hal menjaga kesehatan mental dengan mudah, sejalan dengan visi kami mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi," imbuhnya.

Sementara itu, Tika Bravani, Aktris dan seorang Ibu yang juga tengah mempersiapkan perencanaan keuangan pendidikan anak mengatakan, selain rencana pendidikan, mengetahui minat dan bakat anak sama pentingnya sehingga orang tua dapat membimbing pendidikan mereka dan membantu mengembangkan potensi karier masa depan mereka. "FWD Berkah Pendidikan meringankan beban kami sebagai orang tua dengan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan tingkat universitas dan menyediakan sistem dukungan terutama terkait kesehatan mental," terangnya. (disway/sep)



ASURANSI: FWD Berkah Pendidikan menyediakan manfaat asuransi dengan layanan dukungan konseling bagi orang tua dalam mendampingi buah hati mereka menyiapkan masa depan.

Judul	BUMN Otorita IKN Bakal Dikucur Rp500 Miliar
Nama Media	Koran Kaltim
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg3
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

BUMN Otorita IKN Bakal Dikucur Rp500 Miliar



SRI MULYANI

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk PT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Anggaran Rp500 miliar kita masukkan dalam PT Bina Karya. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Ja-

karta Pusat, Selasa (12/9).

"Ini adalah bentuk penyertaan modal negara (PMN) capex pertama di dalam rangka BUMN yang nanti dikelola Otorita IKN bisa melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kerja sama dengan swasta, terutama membangun IKN di bidang telekomunikasi dan infrastruktur dasar," imbuh Sri Mulyani dilansir dari CNN Indonesia.

Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun. Selain untuk Bina Karya, Rp3 triliun lainnya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik private serta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani. (cnn/sh/ga)

Judul	Menkeu Modali Bina Karya Demi Muluskan Proyek IKN
Nama Media	Koran Kaltim
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg4
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

Menkeu Modali Bina Karya Demi Muluskan Proyek IKN

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk PT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Anggaran Rp500 miliar kita masukkan dalam PT Bina Karya. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

"Ini adalah bentuk penyertaan modal negara (PMN) capex pertama di dalam rangka BUMN yang nanti dikelola Otorita IKN bisa

melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk kerja sama dengan swasta, terutama membangun IKN di bidang telekomunikasi dan infrastruktur dasar," imbuh Sri Mulyani.

Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun. Selain untuk Bina Karya, Rp3 triliun lainnya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara

ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merias. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi),

tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik private serta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani. (cnn/si/ga)

Judul	OJK Bubarkan DPLK BCA Life
Nama Media	Koran Kaltim
Newstrend	OJK Bubarkan DPLK BCA Life
Halaman/URL	Pg4
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Negative

OJK Bubarkan DPLK BCA Life

JAKARTA - Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-59/D/05/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, yang beralamat di Chase Plaza Lantai 22 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 terhitung efektif sejak tanggal 30 Juni 2023.

Dalam pengumuman di laman resmi OJK disebutkan pembubaran DPLK BCA Life dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, yaitu Direksi PT Asuransi Jiwa BCA dengan alasan bahwa PT Asuransi Jiwa BCA selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life akan fokus pada bisnis di bidang Asuransi Jiwa.

KDK Nomor KEP-59/D.05/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life yaitu Tony (Ketua) dan

Cindi (Anggota).

Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014, tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK mengungkapkan telah mencabut izin usaha pialang asuransi, PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers. Informasi tersebut tertuang melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 58/D.05/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

"PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi, dilarang untuk meng-



ISTIMEWA

BUBARKAN: OJK membubarkan DPLK BCA Life dan mencabut izin usaha pialang asuransi

gunakan kata Pialang Asuransi, Insurance Broker dan/atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi," tulis pengumuman OJK.

Namun, dalam pengumuman ini OJK tidak membeberkan alasan pencabutan izin usaha perusahaan yang beralamat di Gedung Kopi Lantai 3 Ruang 304, Jl. RP. Soeroso No. 20, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

OJK hanya menyampaikan bahwa perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan apapun yang mencirikan kegiatan pialang asuransi dan diwajibkan menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di luar kantor pusat.

"Serta menyelesaikan hak kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya. (dtk/si/ga)

Judul	OJK Bubarkan DPLK BCA Life
Nama Media	Harian Metropolitan
Newstrend	OJK Bubarkan DPLK BCA Life
Halaman/URL	Pg8
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Negative

OJK Bubarkan DPLK BCA Life

METROPOLITAN

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-59/D/05/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, yang beralamat di Chase Plaza Lantai 22 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 terhitung efektif sejak tanggal 30 Juni 2023.

Dalam pengumuman di laman resmi OJK disebutkan pembubaran DPLK BCA Life dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life, yaitu Direksi PT Asuransi Jiwa BCA dengan alasan bahwa PT Asuransi Jiwa BCA selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life akan fokus pada bisnis di bidang Asuransi Jiwa.



KEBUJAKAN: OJK membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life.

K D K Nomor (Anggota). Tim Likuidasi bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.05/2014 tentang

Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life untuk tetap tenang karena dana Peserta akan dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK mengungkapkan telah mencabut izin usaha pialang asuransi, PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers. Informasi tersebut tertuang melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 58/D.05/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

"PT Bintang Jasa Selaras Insurance Brokers dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi, dilarang untuk menggunakan

kata Pialang Asuransi, Insurance Broker dan/atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi," tulis pengumuman OJK.

Namun, dalam pengumuman ini OJK tidak membeberkan alasan pencabutan izin usaha perusahaan yang beralamat di Gedung Kopi Lantai 3 Ruang 304, Jl. RP. Soeroso No. 20, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

OJK hanya menyampaikan bahwa perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan apapun yang mencirikan kegiatan pialang asuransi dan diwajibkan menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di luar kantor pusat "Serta menyelesaikan hak kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya. (dtk/eka)

Judul	Sri Mulyani: Di Awal 2024, PMN Untuk 3 BUMN Sebesar Rp28,1 Triliun
Nama Media	Pelita Baru
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

Sri Mulyani: Di Awal 2024, PMN Untuk 3 BUMN Sebesar Rp28,1 Triliun

Jakarta, Pelita Baru

MENTERI Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan rencana pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) di awal 2024 untuk 3 BUMN sebesar Rp28,1 triliun di hadapan Komisi XI DPR RI.

"Sebelumnya dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2024 pada 5 September lalu menyepakati PMN pada 3 BUMN untuk dcairkan di awal kuartal I-2024," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Ketiga BUMN ini antara lain PT Utama Karya (Persero), PT BPUI (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Lebih lanjut Ia menekankan, bahwa pencairan PMN untuk tiga BUMN di awal tahun 2024 merupakan hal yang krusial menyangkut kesehatan perusahaan-perusahaan tersebut. "Untuk Utama Karya sebesar Rp18,6 triliun salah satunya untuk penyelesaian JTTS tahap I," ungkap Sri.

Selain itu, PMN ini juga ditujukan untuk investasi pada proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Belitung. "Kemudian, PMN untuk Wijaya Karya sebesar Rp6 triliun untuk penguatan struktur permodalan WKA dalam mendanai proyek PSN yang sedang dijalankan," tambah Sri.

Sisanya sebesar Rp3,55 triliun adalah PMN untuk BPUI. PMN ini akan digunakan untuk penguatan kapasitas permodalan IFG lite dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. (ahp)

Judul	Bareskrim Limpahkan Tersangka Penggelapan Asuransi Jiwa Kresna ke Kejagung
Nama Media	Sukabumi Ekspres
Newstrend	Kasus Kresna Life
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Negative

Bareskrim Limpahkan Tersangka Penggelapan Asuransi Jiwa Kresna ke Kejagung

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penggelapan PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan tersangka berinisial KS ke Kejagung.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut, pelimpahan ini dilakukan usai berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Pada tanggal 5 september 2023 berdasarkan surat Dittipideksus Bareskrim Polri nomor : B/76/IX/RES.1.11./2023/DITTIPI-DEKSUS, telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung RI," kata Whisnu kepada awak media, Jakarta,

Selasa, 12 September 2023.

Kejaksaan Agung sendiri pada tanggal 4 September 2023 telah menyatakan berkas perkara itu telah lengkap atau P-21, berdasarkan surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor: b-3508/e.3/eku.1/09/2023, berkas perkara nomor : BP / 105 / IX / RES.1.11 / 2022 / DITTIPI-DEKSUS, 16 September 2022.

Dalam hal ini, Whisnu menyebut bahwa, terdapat sembilan laporan polisi yang masuk dengan terlapor sekaligus Tersangka KS.

Adapun modus dari kasus ini adalah, menginvestasikan premi dari produk asuransi k-lita atau kresna link investa dan pik atau protecto investa kresna di saham/efek terafiliasi yang melebihi ketentuan OJK.

"Tidak memberitahukan atau melaporkan kepada pemegang polis tentang perkembangan investasi atau nilai aktiva bersih," ujar Whisnu.

Kasus ini, kata Whisnu, memakan jumlah korban sebanyak 278 orang dan kerugian sebanyak kurang lebih Rp 431 miliar.

Dalam perkara ini Tersangka KS, dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atas perbuatannya, KS dijerat dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau Pasal 378 KUHP

dan/atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di sisi lain, lanjut Whisnu, penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara terkait perkara Group Kresna lainnya yakni Kresna Sekuritas pada 11 September 2023. Hasil daripada gelar perkara memutuskan menetapkan Owner Group Kresna berinisial MS sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 103 Juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3,4,5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (Anisha Aprilia)

Judul	Astra Life Mudahkan Pelaku UMKM Berikan Proteksi bagi Karyawannya
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	Astra Life meluncurkan produk asuransi kesehatan kumpulan AVA Group Medical Protection
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Negative

Astra Life Mudahkan Pelaku UMKM Berikan Proteksi bagi Karyawannya

NERACA

Jakarta - PT Asuransi Jiwa Astra Life (Astra Life) meluncurkan produk asuransi kesehatan kumpulan AVA Group Medical Protection. Produk ini digagas untuk memudahkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan proteksi bagi karyawannya.

Pelaku UMKM bisa menyediakan employee benefit bagi karyawan dengan harga premi yang terjangkau melalui produk ini. Syarat jumlah peserta minimalnya pun 3 orang saja. Ini menepis anggapan bahwa asuransi kesehatan membutuhkan dana besar dengan peserta yang harus relatif banyak.

"Kami memahami bahwa karyawan adalah aset paling berharga dari sebuah bisnis, tidak terkecuali bagi para pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah dengan jumlah karyawan yang terbatas. Di sisi lain, kebutuhan para pelaku usaha untuk memberikan perlindungan bagi karyawannya kerap kali terkendala pada anggapan bahwa asuransi kesehatan untuk karyawan memerlukan anggaran dana yang besar. Oleh karena itu, Astra Life menghadirkan AVA Group Medical Protection yang merupakan produk Asuransi Kesehatan Kumpulan untuk karyawan dengan nilai premi yang terjangkau," papar Alkaf Ghozali, Direktur Astra Life dalam keterangan resmi, kemarin.

Ia menambahkan, nilai premi yang terjangkau sebagai salah satu keunggulan dari AVA Group Medical Protection. Karyawan UMKM bisa mendapatkan employee benefit berupa manfaat asuransi dasar yang menanggung penggantian biaya medis untuk manfaat rawat inap dan pembedahan, serta manfaat asuransi pilihan berupa manfaat rawat jalan, manfaat persalinan, serta manfaat perawatan gigi. Adapun premi yang harus disiapkan mulai dari Rp10 juta per polis setiap tahun.

AVA Group Medical Protection juga menyediakan perlindungan optimal dari risiko penyakit maupun kecelakaan yang mungkin terjadi untuk keluarga dari karyawan yang didaftarkan. Produk perlindungan ini tersedia dalam wujud Inner Limit dan as Charged yang juga menyediakan fitur cashless dan reimbursement sehingga memudahkan proses pembayaran klaim oleh nasabah di fasilitas rekanan. AVA Group Medical Protection bisa diakses melalui kanal e-commerce Astra Life, yaitu ilovelife.co.id.

Sebagai informasi, mengacu data Asosiasi Asuransi Janji Indonesia (AAJI), pada semester I-2023 terjadi peningkatan jumlah klaim kesehatan sebesar 33,9 persen year on year (yoy), dari Rp2,61 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Dari sisi jumlah tertanggung juga mengalami kenaikan dari 51,96 juta menjadi 61,33 juta.

Astra Life sendiri per Juni 2023 melayani 377 juta tertanggung. Asuransi yang bernaung di bawah brand Astra Financial dan menjadi bagian dari Astra Group ini tercatat memiliki total aset Rp7,89 triliun. Sedangkan tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) Astra Life ada di level 207 persen, atau jauh di atas threshold dari regulator, yakni 120 persen. 

Judul	BRI Life Catat RBC 481,6%
Nama Media	Ujungpandang Ekspres
Newstrend	BRI +7 Life mencatatkan ND risk based capital (RBC)
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

ASURANSI

BRI Life Catat RBC 481,6%



IWAN PARSILA

PT Asuransi BRI Life atau yang biasa dikenal dengan BRI Life mencatatkan risk based capital (RBC) sebesar 481,6% per Juli 2023. Angka tersebut jauh di atas batas minimum yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

yaitu sebesar 120%.

Direktur Utama BRI Life Iwan Parsila menyampaikan beberapa hal yang diperhatikan perusahaannya yang dapat memengaruhi kinerja RBC nya, antara lain produk-produk harus memiliki profitability yang baik.

Selanjutnya adalah melakukan proses pemasaran dengan baik, di mana hal ini harus diperhatikan guna memenuhi proper market conduct dan memitigasi potensi mis-selling. Kemudian adapun asumsi yang BRI Life gunakan harus divalidasi secara berkala.

"Untuk memastikan asumsi yang digunakan masih valid," ujar Iwan, Selasa (12/09/2023).

Hal lain yang diperhatikan BRI Life adalah penempatan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang sudah disusun dengan memperhatikan karakteristik kewajiban perseroan, likuiditas, dan kualitas aset yang digunakan.

"Pelaksanaan kegiatan usaha yang mengedepankan pengelolaan risiko yang memadai dan penerapan prinsip GCG secara disiplin," tambah Iwan. Sebelumnya, BRI Life juga mencatatkan RBC per Juni 2023 atau pada Semester I-2023 sebesar 479%. (mah)

Judul	BRI Life Catat Hasil Investasi Tembus Rp 831 M
Nama Media	Tribun Lampung
Newstrend	BRI +7 Life mencatatkan ND risk based capital (RBC)
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

BRI Life Catat Hasil Investasi Tembus Rp 831 M

JAKARTA, TRIBUN - PT Asuransi BRI Life mencatat adanya peningkatan hasil investasi pada periode Juli 2023. Hal ini ditopang oleh beragam instrumen investasi yang ditempatkan oleh perseroan, di mana terbesar pada Surat Utang Negara (SUN) mencapai 68%.

Direktur Utama BRI Life, Iwan Pasila menyebutkan bahwa total hasil investasi BRI Life sebesar Rp 831 miliar per Juli 2023, tumbuh 87% year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Iwan merinci, portofolio investasi non unlitik BRI Life terbesar pada Surat

Utang Negara (SUN) 68%, obligasi korporasi 13%, reksadana pasar uang 10%, deposito 7%, dan sisanya di instrumen saham.

"Di kami saham porsinya kecil, karena tidak sesuai dengan karakteristik dan durasi kewajiban kami yang umumnya jangka menengah dan panjang," kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (11/9).

Sayangnya, Iwan tak menyebutkan berapa besar target hasil investasi BRI Life di tahun ini. Meski demikian pihaknya telah memiliki strategi dalam menempatkan investasi.

"Strategi kami adalah menempatkan investasi sesuai


Di kami saham porsinya kecil, karena tidak sesuai dengan karakteristik dan durasi kewajiban kami yang umumnya jangka menengah dan panjang.

IWAN PASILA
Direktur Utama BRI Life

kebijakan investasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan durasi kewajiban, kualitas aset, dan aspek likuiditas untuk memastikan kami da-

pat membayar setiap kewajiban yang jatuh tempo. Jadi tidak hanya sekedar ikut tren pasar," pungkasnya.

Asal tahu saja, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), hasil investasi asuransi jiwa meningkat 138,64% secara tahunan menjadi Rp 21,81 triliun pada Juli 2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 9,13 triliun.

Penopang terbesar meningkatnya hasil investasi itu berasal dari instrumen saham yang tumbuh sebesar 3,88% menjadi Rp 150,93 triliun di Juli 2023, dibandingkan Juli 2022 sebesar Rp 145,29 triliun. Selain itu, pada instrumen SBN meningkat sebesar 23,94% menjadi Rp 153,48 triliun per Juli 2023, dibandingkan periode sebelumnya senilai Rp 123,83 triliun. (kontan.co.id)

Judul	3 BUMN Dapat PMN Rp28,16 Triliun
Nama Media	Banten Raya Post
Newstrend	Pemerintah berencana mencairkan PMN kepada tiga BUMN
Halaman/URL	Pg8
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

3 BUMN Dapat PMN Rp28,16 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan usulan kepada DPR terkait penyertaan modal negara (PMN) untuk tiga BUMN yang mencapai Rp28,16 triliun pada 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan PMN tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan penyelesaian PT Asuransi Jiwasraya yang diharapkan rampung awal 2024.

"Kita memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian Jiwasraya Bahana itu yang utamanya karena kita mau Jiwasraya selesai dengan baik," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi Xi dengan Menteri Keuangan di Gedung Parlemen, Selasa (12/9/2023).

Sebelumnya, dalam Raker tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meng-

usulkan pembahasan PMN untuk tiga BUMN tersebut agar dapat cair di kuartal 1/2024.

"Maka kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan dengan Komisi XI karena timing dari PMN ini juga menentukan dari kesehatan BUMN tersebut," ujarnya dalam Raker tersebut, Selasa (12/9/2023).

Secara rinci, rencananya PMN senilai Rp28,16 triliun tersebut diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK sejumlah Rp18,6 triliun, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) Rp6 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp3,56 triliun.

PMN untuk BPUI dalam rangka penyelesaian pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya yang diharapkan selesai pada tahun depan.

Bila membandingkan de-

ngan tahun lalu, dana segar yang pemerintah suntikan kepada BUMN mencapai Rp42,8 triliun, terbesar untuk Hutama Karya senilai Rp28,88 triliun.

Sementara PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebagai tambahan modal senilai Rp4,5 triliun, di mana Rp3 triliun untuk IFG Life. Kemudian Rp1 triliun untuk PT Aviara Pariwisata Indonesia (InJourney) serta Rp500 miliar untuk PT Bina Karya (Persero) yang akan menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN.

Adapun, pemerintah juga mengucurkan PMN berupa non tunai senilai Rp3,02 triliun yang terbagi kepada BUMN pangan yaitu PT Rajawalin Nusantara Indonesia (Persero) sejumlah Rp2,56 triliun dan PT Len Industri (Persero) Rp456 miliar. **(net)**



BELUM UNTUNG : Tol Binjal-Stabat di Sumatera Utara yang dikelola oleh Hutama Karya.

Judul	Berita Foto - PELUNCURAN FWB BERKAH PENDIDIKAN
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	FWD Insurance Indonesia resmi menghadirkan FWD Berkah Pendidikan
Halaman/URL	Pg15
Tanggal Berita	2023-09-13
Sentimen	Positive

■ PELUNCURAN FWB BERKAH PENDIDIKAN



Bisnis/Himawan L. Nugraha

Direktur PT FWD Insurance Indonesia Ade Bungsu (dari kiri) didampingi aktris Tika Bravani, dan Psikolog Ayoe Sutomo memberikan pemaparan di sela-sela peluncuran FWD Berkah Pendidikan di Jakarta, Selasa (12/9). FWD Berkah Pendidikan merupakan produk

asuransi syariah yang memberikan solusi perencanaan pendidikan dengan layanan dukungan konseling bagi orang tua selama mendampingi anak dalam menyiapkan masa depan. Peluncuran ini sekaligus menandai 10 tahun kehadiran FWD Insurance di Indonesia.

Judul	Power Lunch - Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa Terkontraksi, Premi Asuransi Umum Tumbuh Positif
Nama Media	CNBC INDONESIA
Newstrend	Pertumbuhan Premi Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.09/ed993249457ae9c3d6b01aae8ba120c59af3147132591a2c2b710f5e0f8c5719
Tanggal Berita	2023-09-12
Sentimen	Positive



Sementara itu dari industri asuransi, pendapatan premi asuransi jiwa tercatat masih mengalami kontraksi di Juli 2023. Sebaliknya, industri asuransi umum dan re-asuransi mencatat pertumbuhan pendapatan premi 6,3 persen secara tahunan. Ini kan terjadi yang sama pada tahun sebelumnya, di mana Juli 2022 terjatuh 1,31 persen. Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa berkontraksi sebesar 7,85 persen, year-on-year, dengan nilai sebesar 102,12 triliun rupiah, per Juli 2023, didorong oleh normalisasi kinerja pendapatan premi pada lini usaha PID. Di sisi lain, akumulasi premi asuransi umum dan re-asuransi tumbuh positif 6,3% year-on-year, menjadi 175,027 triliun rupiah. Secara umum, permodalan di industri asuransi terjaga dengan baik, di atas threshold, masing-masing sebesar 460,32 persen dan 311,53 persen. Jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Untuk asuransi sosial, total aset BPJS Kesehatan, per Juli 2023, mencapai 118,95 triliun rupiah atau tumbuh 14,58 persen year-on-year. BABAK 2

Judul	Power Lunch - Likuiditas di Sistem Keuangan RI Saat Ini Terbilang Masih Cukup Baik
Nama Media	CNBC INDONESIA
Newstrend	Likuiditas di Sistem Keuangan RI
Halaman/URL	https://app.newstensity.com/news/detail/news-2023.09/5c30a96bbd3db6bbe4022bdf56034962a709bbecae66773195ef2f244dc87b0e
Tanggal Berita	2023-09-12
Sentimen	Positive



Baik Pak Mirza terlepas dari industri asuransi jiwa yang masih berusaha pulih kita lihat kinerja sektor keuangan sebenarnya dalam tren yang positif OJK melihat Seperti apa situasi industri keuangan terkini hingga akhir 2023 nanti

"kalau kita lihat ya kan per yang tadi yang perbankan tadi sampaikan oleh Pak ya itu perbankan kredit tumbuh 8,5% itu YOY ya per Juli kalau lembaga pembiayaan lembaga pembiayaan itu lebih tinggi Walaupun memang size lembaga pembiayaan kan jauh lebih kecil dibandingkan perbankan lembaga pembiayaan itu tumbuh 16,2% YOY"

Judul	AIA Indonesia Manfaatkan Teknologi AI untuk Rekrut Agen
Nama Media	investor.id
Newstrend	AIA Indonesia Manfaatkan Teknologi AI untuk Rekrut Agen
Halaman/URL	https://investor.id/insurance/340358/aia-indonesia-manfaatkan-teknologi-ai-untukrekrut-agen
Tanggal Berita	2023-09-12
Sentimen	Positive

AIA Indonesia Manfaatkan Teknologi AI untuk Rekrut Agen

Penulis : Nida Sahara

🕒 12 Sep 2023 | 11:55 WIB

BAGIKAN



AIA Indonesia mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dalam proses rekrutmen talenta agen asuransi. (ist)

JAKARTA, investor.id - Perusahaan asuransi jiwa PT AIA Financial (AIA Indonesia) mengintegrasikan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) dalam proses rekrutmen talenta agen asuransi. Inovasi baru ini bertujuan untuk memudahkan proses perekrutan baik bagi para kandidat agen asuransi di AIA maupun bagi perusahaan, serta demi menyediakan penilaian yang lebih objektif melalui pemanfaatan AI.

Judul	AAJI Menyebut Peningkatan Hasil Investasi Berasal dari Saham dan SBN
Nama Media	id.tradingview.com
Newstrend	Kinerja positif instrumen saham dan Surat Berharga Negara (SBN)
Halaman/URL	https://id.tradingview.com/news/kontan:e3b97b72587ea:0/
Tanggal Berita	2023-09-12
Sentimen	Positive

Kontan.co.id

AAJI Menyebut Peningkatan Hasil Investasi Berasal dari Saham dan SBN

12 Sep 2023 • 13.14 GMT+7



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan peningkatan hasil investasi di asuransi jiwa utamanya disebabkan oleh kinerja positif instrumen saham dan Surat Berharga Negara (SBN).

“Investasi pada instrumen saham dan SBN pada semester I 2023, masing-masing mencapai Rp 158,2 triliun dan Rp 157,2 triliun. Proporsi keduanya mencapai sekitar 58% dari total investasi pada periode tersebut,” kata Direktur Eksekutif AAJITogar Pasaribu kepada Kontan.co.id, Senin (11/9).

Togar tak memungkiri jika instrumen saham menjadi salah satu faktor tingginya hasil investasi. Selain itu, kata dia, kondisi pasar modal yang mulai kondusif pasca pandemi juga mempengaruhi instrumen tersebut.

Baca Juga: Porsi Besar di Obligasi, Hasil Investasi IFG Life Mencapai Rp 842 Miliar di Juli 2023

Dia menyebutkan, setidaknya ada dua faktor penyebab kenaikan investasi di instrumen saham. Pertama, kondisi pasar modal yang kondusif pasca pandemi.

“Sejak awal 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tentunya menarik minat Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ) untuk berinvestasi di pasar modal, khususnya saham,” imbunya.